

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Andriani, P.J.A. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Angrayni, Lysa. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*. Riau: Suska Press, 2014.
- Anto, M.B. Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Djajadiningrat., S.I. *Asas dan Dasar perpajakan 2*. Bandung: Eresco, 2012.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamzah, Jur Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Irianto, Sulistyowati. *Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal Dan Implikasi Metodologisnya, dalam Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Buku Obor dan JHMP-FHUI, 2009.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Miyasto. "Sistem Perpajakan Nasional Dalam Era Ekonomi Global." Semarang, 2017.
- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mustaqiem, Dr., SH., M.Si. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2014.
- Mustaqiem. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH-UII Pers, 2006.
- Noor, Jualiansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Purwono, Herry. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Rahadjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta:

- Genta Publishing, 2009.
- Rasdjidi, Lili, dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saidi, Muhammad Djafar, dan Eka Merdekawati Djafar. *Hukum Keuangan Negara: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sarikat Putra Jaya, Nyoman. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Siahaan, Marihot P. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soemitro, Rochmat. *Azas Dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Eresco, 1986.
- . *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, 1992.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat, 2016.
- Suciyani, Fitri. “Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Dharmasiswa* 2, no. 1 (2022): 375–88.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tunggal, Amin Widjaja. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

## **Jurnal**

- Ardiansyah. “Lemahnya Penegakan Hukum Dan Solusi Untuk Menuju Penegakan Hukum Yang Lebih Baik Di Indonesia.” *Jurnal De Facto* 5, no. 1. 2018.
- Asriyani. “Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak.” *Jurnal Katalogis* 5, no. 8. 2017.
- Astuti, Wigi, dan Yudea. “Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan.” *Forum Ekonomi* 18, no. 1. 2016.
- Biroli, Alfian. “Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum).” *DIMENSI: Journal of Sociology* 8, no. 2. 2015.
- Djati, Daniel Mulia, Dwi Jatmiko Cahyono, H Dedi Candra Wijaya, dan Orpa

- Lintin. “Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/Puu-Xviii/2020).” *Jurnal IKAMAKUM* 2, no. 1 (2022).
- Ferdian, Muhammad. “Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2019).
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. “Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022).
- Hanifa, Nurul, dan Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah. “Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19.” *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (2021).
- Kusuma, Mahesa Jati. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Menjadi Korban Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 5, no. 9 (2013).
- Matondang, Abdul Waha, dan Mawaddah Mutia Rohmah. “Analisis Penerimaan Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.” *Jurnal Manajemen* 4, no. 2 (2018).
- Maulana, Iqbal, dan Imahda Khoiri Furqon. “Analisis Tax Amnesty Sebagai Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Di Sektor Pajak.” *Balanca* 3, no. 1 (2021).
- Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).
- Mulyani, Lilis. “Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum.” *Jurnal Masyarakat & Budaya* 12, no. 3 (2010).
- Mulyanto. “Keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Bali Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015).
- Pracasya, Diani Putri. “Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah Atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.” *Dharmasisya* 1, no. 2 (2021).
- Rachdianti, Finny T., Endang S. Astuti, dan Heru Susilo. “Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 11, no. 1 (2016).
- Santoyo. “Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008).

## **Internet**

- Anugrahdwi. “Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia,” 2023. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>.
- Riyanto, Agus. “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?,” 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.
- Shidarta. “Kajian Sosio-Legal Yang Melampaui Sosiologi Hukum,” 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/09/11/kajian-sosio-legal-yang-melampaui-sosiologi-hukum/>.
- . “Perbedaan Kajian Sosiologi Hukum, Hukum Dan Masyarakat, Sociological Jurisprudence, Dan Sosio-Legal,” 2022. <https://business-law.binus.ac.id/2022/01/12/perbedaan-kajian-sosiologi-hukum-hukum-dan-masyarakat-sociological-jurisprudence-dan-sosio-legal/>.
- Wahyuni, Willa. “Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia,” 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-pajak-lt62174cb312e03/>.
- Wijaya, Angreni. “Keberatan Pajak, Bagaimana Proses Pengajuannya?,” 2020. <https://pajakstartup.com/2020/06/04/keberatan-pajak-bagaimana-pencabutan-permohonannya/>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan